

REPRESENTASI RESISTENSI DALAM KAMPANYE DIGITAL “BRAVE PINK HERO GREEN” MELALUI AKUN INSTAGRAM @GREENPEACEID

Amelia Raidy Yuniar; Yudha Wirawanda, S.I.Kom, M.A.

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika,
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Media sosial sebagai arena bagi masyarakat untuk melakukan resistensi digital terhadap kebijakan pemerintah maupun struktur kekuasaan, salah satunya melalui fenomena *Brave Pink Hero Green*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi resistensi dalam kampanye digital *Brave Pink Hero Green* pada akun Instagram @greenpeaceid menunjukkan praktik kontra hegemoni. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan paradigma kritis. Terdapat sembilan postingan dalam kampanye digital *Brave Pink Hero Green* pada akun Instagram @greenpeaceid yang dipilih secara purposive. Berdasarkan hasil analisis semiotika Roland Barthes terhadap tanda visual, verbal, dan audio pada sembilan postingan dalam kampanye digital *Brave Pink Hero Green*, terdapat empat tema resistensi yang diidentifikasi dalam akun Instagram @greenpeaceid yaitu resistensi melalui produksi narasi ketidakadilan, resistensi terhadap resistensi aparat, resistensi gender dan inklusivitas, serta resistensi melalui artikulasi tuntutan rakyat. Keempat tema resistensi tersebut mencerminkan praktik kontra hegemoni dalam perspektif Antonio Gramsci, dimana masyarakat sipil sebagai kelompok subordinat memanfaatkan media sosial untuk menentang dominasi kekuasaan yang dilakukan oleh aparat dan lembaga negara melalui produksi narasi tandingan. Dengan demikian, akun Instagram @greenpeaceid sebagai arena pertarungan makna yang mengartikulasikan resistensi terhadap praktik dominasi kekuasaan.

Kata Kunci: Representasi, Resistensi Digital, Semiotika Roland Barthes, Kampanye Digital.

Abstract

Social media as an arena for people to carry out digital resistance against government policies or power structures, one of which is through the *Brave Pink Hero Green* phenomenon. This study aims to analyze the representation of resistance in the *Brave Pink Hero Green* digital campaign on the Instagram account @greenpeaceid showing counter-hegemonic practices. Qualitative methods are used in this study with a critical paradigm. There are nine posts in the *Brave Pink Hero Green* digital campaign on the Instagram account @greenpeaceid that were selected purposively. Based on the results of Roland Barthes' semiotic analysis of visual, verbal, and audio signs in the nine posts in the *Brave Pink Hero Green* digital campaign, there are four resistance themes identified in the Instagram account @greenpeaceid namely resistance through the production of narratives of injustice, resistance against resistance from the authorities, resistance from gender and inclusivity, and resistance through the articulation of people's demands. These four resistance themes reflect counter-hegemonic practices from Antonio Gramsci's perspective, where civil society as a subordinate group utilizes social media to oppose the domination of power carried out by state officials and institutions through the production of counter-narratives. Thus, the Instagram account @greenpeaceid is an arena for the struggle for meaning that articulates resistance against the practice of domination power.

Keywords: Representation, Digital Resistance, Roland Barthes' Semiotics, Digital Campaigns.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap kehidupan masyarakat dalam mengakses informasi, berinteraksi, dan berpartisipasi dalam ranah politik. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat pertukaran informasi berbasis internet dan teknologi web 2.0 (Kaplan & Haenlein, 2010), tetapi juga menjadi arena bagi masyarakat untuk melakukan gerakan sosial yang sebelumnya dilakukan melalui aksi fisik di ruang publik. Aktivisme digital melibatkan penggunaan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan informasi dan mengorganisir tindakan kolektif masyarakat (Farid, 2024). Dalam penelitian ini, aktivisme tersebut diwujudkan melalui kampanye digital sebagai strategi komunikasi yang memanfaatkan media sosial untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan perubahan sosial.

Sebagai ruang kontestasi masyarakat dalam menyuarakan isu terkait kepentingan politik dan sosial, media sosial memiliki karakteristik yang berbeda dengan media konvensional. Media sosial memungkinkan individu maupun kelompok untuk menyebarkan informasi secara cepat. Karakteristik media sosial yang interaktif, partisipatif, dan *real time* menjadikannya ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, mengadvokasi isu publik, dan menciptakan narasi tandingan terhadap wacana dominan yang diproduksi oleh kelompok berkuasa. Dengan demikian, media sosial sebagai alat resistensi digital yang dapat memobilisasi partisipan pada aksi unjuk rasa dan membentuk wacana tentang isu politik (Mundt et al., 2018).

Resistensi sebagai serangkaian upaya yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk menentang ideologi, budaya, dan struktur kekuasaan yang menindas (Filc, 2021). Pada penelitian ini, resistensi berfokus mengenai gerakan partisipasi non kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat untuk menentang kebijakan maupun struktur kekuasaan dalam memperjuangkan hak, keadilan, dan kebebasan berekspresi dalam lingkup demokrasi. Aksi resistensi tidak hanya terbatas pada demonstrasi di ruang atau fasilitas publik seperti gedung pemerintah dan jalan, tetapi sudah menyebar ke media sosial secara cepat dan massif.

Salah satu resistensi digital yang menjadi isu viral berupa fenomena *Brave Pink Hero Green* yang muncul pasca demonstrasi pada bulan Agustus sampai September 2025. Resistensi ini bermula dari *resistance blue* yang muncul dari gelombang protes tahun 2024-2025 melalui visual "Peringatan Darurat" menggunakan warna biru gelap sebagai simbol penolakan terhadap kebijakan pemerintah (Ayuningtyas et al., 2026). Kemudian, muncul fenomena *Brave Pink Hero Green* yang mengacu pada

kombinasi simbol warna merah muda (*Brave Pink*) dan hijau (*Hero Green*) dalam berbagai poster digital, video, meme, dan foto profil media sosial. Dalam konteks semiotika, warna sebagai tanda (*sign*) yang menghasilkan makna berdasarkan konteks budaya sehingga dapat menyampaikan emosi tertentu kepada audiens (Sviličić et al., 2024). Warna *pink* yang awalnya identik dengan kelembutan (Aryanti, 2025), kini dimaknai sebagai simbol yang melambangkan keberanian dan semangat perlawanan setelah muncul aksi warga bernama ibu Ana menggunakan hijab merah muda dengan membawa bendera merah putih yang berusaha melawan aparat kepolisian pada aksi demonstrasi. Hal tersebut menyatakan bahwa keberanian tidak mengenal jenis kelamin dan usia. Warna *green* menjadi simbol yang melambangkan rasa empati, duka, solidaritas dan sebagai bentuk penghormatan bagi Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas terlindas mobil Brimob.

Akun instagram @greenpeaceid sebagai subjek penelitian merupakan bagian dari Organisasi Non Pemerintah (*Non Governmental Organization*) yang menurut beberapa penelitian menggunakan Instagram sebagai media kampanye digital terutama terkait isu lingkungan (Fadli & Sazali, 2023; S. A. Putri, 2025). Akun tersebut menurut Fadli & Sazali (2023) memiliki peran penting sebagai media advokasi lingkungan karena mampu memberikan informasi dan himbauan kepada masyarakat untuk melestarikan lingkungan. Sebagai NGO yang berperan sebagai pihak yang melakukan advokasi dalam gerakan sosial (Frantz, 1987), Greenpeaceid tidak hanya terkait dengan isu lingkungan, namun juga isu sosial dan politik lainnya. Seperti pada saat pemilu menurut penelitian Elizabeth & Mustikasari (2024) Greenpeaceid berperan penting dalam membentuk opini publik dan mendorong perubahan kebijakan pemerintah dalam bentuk konten visual. Kemudian, Greenpeaceid juga turut mendukung resistensi digital salah satunya dalam fenomena *Brave Pink Hero Green*.

Terdapat berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian sehingga dapat memperjelas kebaruan dari riset ini. Penelitian Salsabila et al. (2026) mengenai kampanye *Brave Pink* dan *Hero Green* yang mengkaji tanda verbal berupa teks dalam postingan akun instagram @mantapfunny's melalui analisis semiotika Pierce dengan kategori ikon, indeks, dan simbol. Temuan tersebut menunjukkan tanda verbal berperan dalam menciptakan makna perlawanan politik dan sosial. Pemaknaan warna *Brave Pink* dan *Hero Green* juga telah dikaji oleh Aziz et al. (2026) pada foto profil media sosial melalui tiga dimensi semiotika Charles Morris yaitu semantik, sintaktik dan pragmatik. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kedua warna sebagai tanda (*sign*) menciptakan makna emosional yang merepresentasikan nilai keberanian, solidaritas, dan empati. Penelitian resistensi digital oleh Wahjono et al. (2025) menunjukkan bahwa dua meme Instagram terkait isu kenaikan pajak merepresentasikan kritik melalui semiotika Barthes (denotasi, konotasi, dan mitos) dan representasi Hall (pendekatan reflektif, intensional, dan konstruktionis) menunjukkan resistensi terhadap wacana otoriter negara yang tercermin melalui kekhawatiran publik, kritik sindiran, dan

menciptakan konstruksi makna alternatif yang menentang narasi terkait kebijakan perpajakan.

Berdasarkan penjelasan dari tiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa fenomena *Brave Pink Hero Green* dan resistensi digital hanya dianalisis melalui tanda visual dan verbal serta belum terdapat kajian yang membahas fenomena *Brave Pink Hero Green* sebagai strategi kampanye digital dalam lingkup aktivisme Greenpeaceid. Oleh karena itu, keunikan penelitian ini terletak pada penggunaan semiotika Roland Barthes yang menganalisis tanda visual, verbal, dan audio melalui tiga tingkatan pemaknaan yaitu denotasi, konotasi, dan mitos. Selain itu, peneliti mengaitkan empat tema resistensi dalam postingan Instagram @greenpeaceid dengan teori kontra hegemoni Antonio Gramsci untuk mengidentifikasi bagaimana hegemoni dan kontra hegemoni direpresentasikan dalam media digital untuk menentang kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan publik.

Dengan adanya penjelasan yang telah dipaparkan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana representasi resistensi dalam kampanye digital *Brave Pink Hero Green* pada akun Instagram @greenpeaceid menunjukkan praktik kontra hegemoni. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk menganalisis representasi resistensi dalam kampanye digital *Brave Pink Hero Green* pada akun Instagram @greenpeaceid menunjukkan praktik kontra hegemoni. Implikasi penelitian ini dalam ilmu komunikasi diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan kajian media digital, khususnya memahami kampanye digital sebagai strategi yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah dalam melakukan aktivisme digital.

1.2. Teori Semiotika Roland Barthes

Semiotika berkaitan dengan proses pembentukan makna dari suatu tanda (Alruwaili et al., 2025). Tanda adalah bentuk yang dapat dirasakan oleh indera dan mengandung makna melalui proses interpretasi yang mewakili suatu hal. Roland Barthes sebagai ahli semiotika asal Prancis yang dikenal dengan konsep *mythologies* dan mengembangkan kerangka pemikiran Ferdinand De Saussure mengenai semiologi (Prasetya, 2019).

Model analisis tanda signifikasi ditingkatkan oleh Barthes menjadi dua tahap yaitu signifikasi tahap pertama dan kedua. Pada signifikasi tahap pertama adalah korelasi antara petanda dan penanda dalam tanda untuk menghasilkan makna denotasi. Barthes (2012) mengartikan denotasi sebagai makna tanda yang sebenarnya dan bersifat objektif. Sedangkan signifikasi tahap kedua adalah tanda pada denotasi menjadi penanda pada konotasi. Konotasi adalah hubungan antara penanda (bentuk material tanda) dan petanda (konsep mental yang diwakilinya) yang memuat makna secara tidak langsung dan bersifat subjektif (Toni, 2025).

Elemen ketiga dalam semiotika Barthes adalah mitos, yaitu sistem komunikasi yang berada pada tataran signifikasi lapis kedua dan bekerja melalui proses naturalisasi (Barthes, 2012). Dengan

kata lain, mitos dapat menjadikan nilai-nilai dan ideologi budaya dengan menampilkannya seolah-olah bersifat alami melalui hubungan yang kompleks antara penanda dan petanda, sehingga hakikat dari mitos adalah mengubah histori/sejarah menjadi bagian dari alam (Huang, 2025).

Dengan menggunakan teori semiotika Roland Barthes, penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi tanda visual, verbal, dan audio dalam postingan Instagram @greenpeaceid yang kemudian dianalisis melalui tiga tingkatan makna meliputi denotasi dengan mengidentifikasi makna literal yang muncul dari tanda dalam postingan tersebut, konotasi dengan menafsirkan makna implisit sesuai konteks sosial, budaya, dan politik, dan mitos yang terbentuk dari ideologi yang dinaturalisasi. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengungkap makna resistensi yang dikonstruksikan melalui berbagai tanda dan ideologi serta nilai tertentu yang dinaturalisasi melalui representasi dalam media sosial.

1.3. Kampanye Digital Sebagai Strategi Aktivisme Digital

Media sosial sebagai ruang partisipasi publik dalam melakukan aktivisme digital. Aktivisme digital merupakan penggunaan teknologi digital dalam ranah ekonomi, sosial, dan politik dengan jangkauan luas untuk menyebarkan informasi dan mendukung gerakan sosial (Joyce, 2010). Aktivisme digital tidak hanya dilakukan oleh individu maupun kelompok, tetapi juga oleh organisasi.

Gerakan sosial yang berkembang melalui media sosial tidak hanya menjadi sarana dalam mengekspresikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga mengadvokasi perubahan kebijakan terkait berbagai isu yang tidak memperoleh respon publik (Nawar, 2024). Salah satu platform media sosial yang memungkinkan para aktivis untuk mendukung keberhasilan gerakan sosial berupa Instagram. Namun, aktivisme digital yang dilakukan melalui Instagram tidak sepenuhnya berhasil karena memiliki keterbatasan dalam bentuk konten visual. Dengan demikian, pengguna Instagram dapat menyesuaikan fitur agar dapat mencapai keberhasilan dalam gerakan sosial (Cornet et al., 2017).

Aktivisme digital diwujudkan melalui kampanye digital, yaitu strategi komunikasi melalui media digital untuk menyampaikan pesan dalam mencapai tujuan pada kurun waktu tertentu, mengadvokasi isu, dan mendorong keterlibatan publik dalam gerakan sosial. Informasi yang disampaikan melalui kampanye digital dapat tersebar dengan cepat, hemat biaya, dan menjangkau khalayak luas (Arianita et al., 2021). Karakteristik tersebut menjadikan kampanye digital sebagai strategi komunikasi yang efektif dalam membangun kesadaran publik dan menjadi praktik aktivisme digital.

Karakteristik media sosial yang mendukung kampanye digital berupa kecepatan dalam menyebarkan informasi sehingga memperkuat solidaritas global, memfasilitasi partisipasi pengguna

dalam proses produksi dan distribusi informasi, dan memadukan teks, gambar, video, dan audio untuk memperkuat narasi pesan (Amali & Priatna, 2024). Narasi yang terbentuk pada ruang digital tersebut kemudian berlanjut pada tindakan kolektif seperti mobilisasi massa sebagai bentuk implementasi dukungan yang telah dibangun. Dengan demikian, aktivitas online dan offline memiliki hubungan yang saling mendukung dalam mencapai keberhasilan gerakan sosial.

Dalam penelitian ini, kampanye digital menjadi strategi aktivisme digital yang dilakukan oleh Greenpeaceid berbasis *Non Governmental Organization* untuk memobilisasi partisipan dalam mengekspresikan kritik terhadap kebijakan pemerintah melalui konten digital. Dengan penggunaan media sosial oleh organisasi non profit memiliki tiga peran inti yaitu menyebarkan informasi (*information*), membentuk komunitas (*community*), dan melakukan tindakan (*action*) (Lovejoy & Saxton, 2012). Sehingga hal ini menunjukkan bahwa kampanye digital yang dilakukan oleh @greenpeaceid tidak hanya bertujuan untuk membagikan informasi, tetapi juga dapat membangun partisipasi publik untuk melakukan tindakan kolektif melalui aksi demonstrasi.

1.4. Representasi Dalam Media Digital

Pada buku yang ditulis oleh Hall (1997) berjudul “*Representation : Cultural Representations And Signifying Practices*”, definisi dari representasi adalah proses penting dalam pembentukan dan pertukaran makna yang melibatkan penggunaan tanda, bahasa, dan gambar diantara anggota budaya untuk menggambarkan suatu hal. Jadi, pengertian singkat mengenai representasi adalah proses produksi makna melalui bahasa untuk memahami dunia (Busumtwi-Sam & Kashyap, 2025). Hall (1997) membagi representasi menjadi tiga pendekatan utama yaitu pendekatan reflektif, intensional, dan konstruktionis.

Dalam era digital, representasi berkembang melalui media sosial sebagai ruang baru produksi makna. Media sosial memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan konten dalam berbagai bentuk seperti teks, audio, maupun video sehingga menjadi ruang aktif konstruksi makna. Di ruang tersebut, simbol seperti meme sebagai alat utama representasi. Menurut Aripai & Hayat (2024), meme sebagai tanda semiotika di mana *signifier* (penanda) adalah teks atau gambar, sedangkan *signified* (petanda) adalah gagasan yang akan disampaikan. Seperti meme digital di Instagram tidak hanya berfungsi sebagai humor, namun juga dapat membangun konstruksi sosial terhadap kritik kebijakan melalui simbol yang dihasilkan dalam wacana digital (Wahjono et al., 2025).

Simbol tersebut membentuk konstruksi makna yang tidak terlepas dari peran algoritma platform. Algoritma media sosial beroperasi melalui personalisasi konten yang berpotensi membentuk *filter bubble* berupa ruang informasi yang bersifat homogen dan terbatas serta *echo chamber* di mana ruang opini yang membatasi sudut pandang lain sehingga kondisi ini berimplikasi pada bias kognitif dan

isolasi digital (N. Putri, 2023). Dengan demikian, representasi di media digital sebagai konstruksi makna yang dibentuk secara sosial, kultural, dan teknologis melalui interaksi antar pengguna, tanda, dan algoritma platform.

1.5. Resistensi dan Kontra Hegemoni Gramsci

Resistensi adalah bentuk perlawanan individu maupun kelompok untuk menyampaikan penolakan terhadap kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Scott (1985) membagi dua jenis resistensi yaitu resistensi terbuka (langsung dan terorganisir) dan resistensi tertutup (simbolik seperti sindiran dan rumor). Dalam perspektif Antonio Gramsci, resistensi sebagai konsep kontra hegemoni, yaitu upaya untuk menentang kepercayaan, ideologi, dan budaya dominan dalam masyarakat (Cox & Schilthuis, 2012). Dalam konteks ini, teknologi menjadi ruang perlawanan dimana media berperan sebagai alat hegemoni yang menyebarkan isu ketidakadilan sosial untuk memenuhi kepentingan kelas dominan dan mengadvokasi perubahan sosial (Baharuddin et al., 2025).

Ketika kekuasaan menjadi atau dianggap sebagai dominasi, maka muncul resistensi terhadap hal tersebut (Vinhagen & Lilja, 2007). Beberapa bentuk resistensi membangun alternatif terhadap keadaan saat ini dalam berbagai bentuk, dari yang kecil hingga yang besar, yang tersembunyi hingga yang terbuka, istilah umum untuk hal ini adalah “resistensi konstruktif”. Sørensen (2016) menyatakan resistensi konstruktif sebagai pertentangan terhadap praktik kekuasaan yang dominan dan terjadi ketika masyarakat mulai membangun secara independen melalui kritik implisit maupun eksplisit terhadap struktur kekuasaan yang mempertahankan status quo. Hal ini merupakan respon terhadap kekuasaan yang menantang dan bernegosiasi sehingga dapat melemahkan kekuasaan.

Darwis & Azwar (2024) menyatakan bahwa hegemoni menjadi konsep penting dalam teori kritis yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci sebagai tokoh yang berkontribusi dalam pemikiran Marxis Italia. Menurut Gramsci et al. (1971), terdapat dua tingkat superstruktural yaitu masyarakat sipil (*civil society*) yang bekerja melalui konsensus dan masyarakat politik atau negara (*political society*) yang bekerja melalui kekuatan, hukum dan koersif meliputi lembaga negara, angkatan bersenjata, polisi.

Hegemoni adalah kepemimpinan politik dan moral yang didapatkan melalui hasil kesepakatan, tidak melalui kekuatan fisik atau dominasi dari satu kelas atau kelompok atas kelas-kelas lain (Gramsci et al., 1971). Pada buku yang ditulis oleh Amsalis (2022), kelas sosial dapat mempertahankan kekuasaannya melalui dua cara yaitu dominasi dan kepemimpinan intelektual serta moral. Konsep hegemoni merujuk pada cara kedua, dimana kelas penindas tidak merasa kalau mereka sedang ditindas. Dalam situasi ini, kelompok yang didominasi tidak menyadari adanya penindasan karena gagasan, nilai, dan kepentingan kelompok dominan telah diterima sebagai sesuatu yang wajar.

Untuk melawan dominasi, kelompok yang tertindas melakukan kontra hegemoni menggunakan media. Dalam perspektif Gramsci, media sosial berperan sebagai arena produksi kontra hegemoni melalui upaya masyarakat sipil untuk menentang hegemoni yang didominasi oleh kelompok berkuasa (Suhardi, 2024). Kontra hegemoni di media sosial dikaji oleh Indranila (2022) yang menyatakan bahwa komunitas daring tentang peran ibu di media sosial menciptakan narasi tandingan terhadap wacana dominan yang membatasi peran ibu hanya pada lingkup domestik sehingga media sosial sebagai arena untuk melakukan resistensi.

Berdasarkan konsep tersebut, akun instagram @greenpeaceid sebagai ruang kontra hegemoni yang memproduksi narasi alternatif terhadap isu sosial dan politik. Dengan demikian, konsep hegemoni dari Antonio Gramsci sangat sesuai untuk menganalisis media digital (Suharto et al., 2026). Penelitian ini menggunakan analisis kontra hegemoni gramsci untuk mengetahui bagaimana representasi resistensi dibangun melalui media digital sebagai upaya untuk menentang narasi dominasi dalam masyarakat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui semiotika Roland Barthes. Pendekatan kualitatif dipilih karena memfokuskan kata kata dibandingkan kuantifikasi pada pengumpulan dan analisis data. Haryono (2020) mengungkapkan bahwa paradigma kritis menganggap ilmu sosial sebagai tahap kritis dalam membongkar struktur kekuasaan yang tersembunyi di balik realitas sosial untuk menciptakan kesadaran sosial agar memperbaiki kondisi kehidupan manusia. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan paradigma kritis untuk mengetahui resistensi melalui praktik ideologi dan kekuasaan yang direpresentasikan melalui tanda semiotika dalam konten kampanye digital.

Subjek penelitian ini adalah akun instagram @greenpeaceid. Teknik penentuan sampel dilakukan secara purposif pada sembilan postingan akun Instagram @greenpeaceid yang aktif menyebarkan konten terkait fenomena *Brave Pink Hero Green*. Kriteria pemilihan sampel meliputi : (1) poster digital dengan latar *Brave Pink* dan *Hero Green*, (2) Terdapat unsur resistensi melalui tanda visual meliputi warna, figur tokoh dan atribut, tanda verbal meliputi teks dalam poster dan caption, dan tanda audio meliputi lagu dalam postingan dan cuplikan video/audio, (3) Dipublikasikan pasca demonstrasi terkait tuntutan rakyat 17+8 pada periode 2 September hingga tanggal 9 September 2025. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi dan analisis tanda terhadap sembilan postingan kampanye digital *Brave Pink Hero Green* dalam konten instagram @greenpeaceid untuk mengidentifikasi tanda visual, verbal, dan audio. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari buku dan jurnal penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik analisis data menggunakan teori semiotika Roland Barthes melalui tiga tingkat pemaknaan yaitu denotasi, konotasi, dan mitos dalam keempat tema resistensi berdasarkan hasil postingan instagram

@greenpeaceid. Denotasi dilakukan dengan mengidentifikasi makna literal dari tanda yang muncul dalam postingan kampanye. Konotasi dilakukan dengan menafsirkan makna dalam tanda denotatif berdasarkan nilai budaya (Urrahmah et al., 2026). Mitos dilakukan dengan mengungkap ideologi yang dinaturalisasi dalam tanda tersebut. Hasil analisis dalam keempat tema resistensi tersebut, kemudian dikaitkan dengan teori kritis Gramsci untuk menjelaskan hubungan masyarakat sipil dan masyarakat politik dalam menentang dominasi kekuasaan serta bagaimana media sosial Instagram @greenpeaceid sebagai arena produksi narasi tandingan.

Validitas data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teori untuk memastikan keyakinan dan kredibilitas hasil penelitian (Setianti et al., 2025). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data visual dan teks dari postingan instagram @greenpeaceid dengan data sekunder berupa jurnal dan buku yang relevan dengan penelitian ini. Sedangkan triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan dan menginterpretasikan teori yang sudah ada sebelumnya yaitu semiotika Roland Barthes dan teori kritis Antonio Gramsci.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis dalam kampanye digital *Brave Pink Hero Green* pada konten Instagram @greenpeace.id dengan proses seleksi konten secara *purposive* menjadi sembilan postingan pada periode 2 September 2025 hingga tanggal 9 September 2025 terdapat empat tema resistensi yang diidentifikasi berdasarkan hasil postingan instagram @greenpeaceid yaitu (1) resistensi melalui produksi narasi ketidakadilan, (2) resistensi terhadap represi aparat, (3) resistensi gender dan inklusivitas, dan (4) resistensi melalui artikulasi tuntutan rakyat.

3.1.1 Resistensi Melalui Produksi Narasi Ketidakadilan

Pada instagram @greenpeaceid memperlihatkan resistensi melalui produksi narasi ketidakadilan yang merepresentasikan ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil dan tidak responsif sehingga memunculkan kesenjangan sosial-ekonomi. Terdapat dua postingan pada kampanye digital *Brave Pink Hero Green* yang menunjukkan tema tersebut yaitu postingan pertama pada tanggal 2 September 2025 dan postingan kedua pada tanggal 4 September 2025.

Kedua postingan ini memiliki perbedaan pada makna denotasi. Postingan pertama hanya menampilkan tanda verbal berupa teks dalam poster dan caption. Sedangkan postingan kedua menampilkan tanda verbal dan tanda visual berupa pejabat keuangan dan perempuan kerudung pink serta tanda audio berupa lagu “Tax The Rich”. Keduanya mengonotasikan keregangan jarak antara presiden dan rakyat dimana presiden bersikap apatis terhadap ketidakadilan fiskal dan minimnya akuntabilitas aparat dalam menangani demonstrasi. Dengan demikian, kedua postingan menegaskan bahwa terbentuk

mitos demokrasi dimana elite sebagai pihak berkuasa yang mendominasi dalam penentuan kebijakan yang seharusnya berada di tangan rakyat.



Postingan Pertama (Sumber : Instagram @greenpeace.id tanggal 2 September 2025)

Tabel 1. Hasil Analisis Foto dan Video

Tingkatan	Makna
Denotasi	Terdapat 3 slide pada postingan yang mencakup tanda verbal berupa teks dalam poster “Presiden gagal memahami kemarahan rakyat”, “Presiden tutup mata dengan problem brutalitas aparat”, tagar #Reset yang mencakup berbagai lembaga negara dalam slide, dan caption menyoroti aksi demonstrasi dikaitkan dengan isu mendasar dan pernyataan presiden yang meminta TNI-POLRI untuk bertindak tegas. Tanda visual berupa latar belakang postingan berwarna hitam dan merah muda dan beberapa frasa berwarna merah muda dan hijau.
Konotasi	Tanda visual dengan latar belakang berwarna hitam menunjukkan ketegangan terhadap kondisi politik yang sedang terjadi. Sedangkan latar belakang warna merah muda menunjukkan sisi emosional yang memperkuat penyampaian narasi dalam poster. Warna merah muda dikaitkan dengan sisi emosional sehingga frasa “akumulasi kekecewaan”, “pemerintah dan DPR”, dan “aparat yang represif” dimaknai sebagai penegasan atas faktor yang menjadi penyebab utama kemarahan publik. Sedangkan warna hijau terkait dengan harapan sehingga pada frasa “Yang Sebenarnya Terjadi” dan “Yang Seharusnya Dikatakan/Dilakukan” dimaknai sebagai solusi alternatif terhadap situasi yang dikritik. Tanda verbal berupa tagar #Reset berbagai lembaga negara menggunakan kata Reset yang secara makna artinya “mengatur ulang” mengonotasikan desakan masyarakat untuk melakukan reformasi total terhadap lembaga negara yang tidak mewakili kepentingan rakyat.

	Penggunaan frasa “gagal paham” dan “tutup mata” menunjukkan sosok pemimpin yang tidak peduli terhadap kondisi rakyat sehingga dapat menurunkan kepercayaan publik dalam sistem demokrasi (Mozumder, 2022).
Mitos	Mitos demokrasi dimana “rakyat yang seharusnya memegang kedaulatan dalam sistem demokrasi” namun kenyataannya tidak mengutamakan partisipasi rakyat. Dengan demikian, postingan ini menaturalisasi gagasan bahwa kritik terhadap pemerintah dilakukan apabila terdapat kebijakan yang tidak memihak pada kepentingan rakyat (Abduh & Cangara, 2022).



Postingan Kedua (Sumber : Instagram @greenpeace.id tanggal 4 September 2025)

Tabel 2. Hasil Analisis Foto dan Video

Tingkatan	Makna
Denotasi	Postingan tersebut berjumlah enam slide yang memuat tanda visual berupa pejabat keuangan negara, perempuan tua berhijab pink, ilustrasi anggota DPR. Tanda verbal berupa penggunaan frasa dalam poster “warga dilindas pajak, pejabat bebas pajak” dan “ketidakadilan pajak berbuntut protes”, dan caption berisikan narasi mengenai pajak, elite, dan kritik terhadap kebijakan fiskal. Tanda audio berupa cuplikan video singkat yang menampilkan pria dengan ekspresi marah dilengkapi dengan teks Tax The Rich dan #Reset Pajak Kita. Selain itu, terdapat tanda audio berupa lagu “Tax The Rich” oleh The Crites.
Konotasi	Tanda visual pejabat keuangan sebagai elite pemerintahan menjadi simbol kekuasaan negara yang turut melanggengkan ketidakadilan dalam sistem pajak (Calabuig & Olcina, 2023). Penggunaan frasa “warga dilindas pajak, pejabat bebas pajak” dan “ketidakadilan pajak berbuntut protes” mencerminkan kesenjangan antara rakyat dan pejabat dimana rakyat menjadi korban pemungutan wajib pajak sedangkan pejabat mendapatkan kebebasan untuk

	tidak membayar pajak. Tanda visual perempuan mengenakan hijab merah muda mewakili rakyat dalam menyuarakan tuntutan terkait keadilan pajak yang menciptakan makna bahwa tuntutan tersebut muncul dari posisi perempuan yang tidak memiliki otoritas dan berada pada kelas subordinat, sedangkan tanda visual pejabat DPR menunjukkan simbol otoritas negara yang memiliki wewenang dalam merumuskan dan memutuskan kebijakan namun kemunculan tokoh tersebut dalam postingan mengonotasikan bahwa keberadaannya menjadi sasaran kritik oleh masyarakat atas kebijakan yang tidak adil. Cuplikan video singkat tersebut menunjukkan kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pajak yang membebani rakyat kecil sehingga diperlukan reformasi menyeluruh terhadap sistem perpajakan melalui mekanisme penarikan beban pajak pada orang kaya. Penggunaan lagu “Tax The Rich” memperkuat narasi terkait kritik terhadap ketimpangan ekonomi dengan menyuarakan tuntutan agar kelompok berpenghasilan tinggi memikul beban pajak secara adil.
Mitos	Mitos “rakyat sebagai korban atas ketidakadilan pajak” berakar dari ideologi populisme yang menempatkan masyarakat ke dalam dua kelompok saling bertentangan yaitu rakyat sebagai pihak dirugikan dan elite sebagai pihak berkuasa (Deha, 2021). Selain itu, terdapat mitos bahwa perempuan tidak hanya berperan dalam ranah domestik tetapi juga terlibat dalam dunia politik. Mitos tersebut menentang budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai sumber kekuatan dominan dalam menentukan kebijakan pemerintah (V. Wahyudi, 2018).

3.1.2 Resistensi terhadap Represi Aparat

Resistensi berikutnya pada akun instagram @greenpeaceid yaitu resistensi terhadap represi aparat. Resistensi ini terdapat pada postingan ketiga pada tanggal 2 September 2025, postingan keempat pada tanggal 4 September 2025, dan postingan kelima pada tanggal 5 September 2025 yang memperlihatkan eksploitasi kewenangan aparat dalam bentuk tindakan kekerasan, penangkapan semena-mena, dan pembubaran paksa aksi unjuk rasa. Terdapat perbedaan makna denotasi dalam ketiga postingan ini. Pada postingan ketiga menampilkan kutipan respon PBB, siluet aparat berwarna merah muda, dan audio juru bicara HAM. Postingan keempat memuat figur pejabat kepolisian, aparat memegang senjata, teks tuntutan rakyat 17+8, dan lagu “Gelap Gempita”. Postingan kelima menampilkan kasus kekerasan polisi secara global disertai dengan penggunaan lagu “Coklat”. Ketiga postingan mengonotasikan kritik terhadap kekerasan aparat sebagai permasalahan global sehingga memicu respon masyarakat untuk melakukan tuntutan reformasi kepolisian. Mitos yang terbentuk bahwa kekerasan aparat sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dimana aparat seharusnya bertugas untuk melindungi masyarakat namun ketiga postingan ini mendekonstruksi makna bahwa aparat sebagai pelaku kekerasan.



Postingan ketiga (Sumber : Instagram @greenpeace.id tanggal 2 September 2025)

Tabel 3. Hasil Analisis Foto dan Video

Tingkatan	Makna
Denotasi	Tiga slide dalam postingan foto dan video mencakup tanda verbal berupa kutipan juru bicara PBB mengenai hak kebebasan berkumpul dan berekspresi yang harus dilakukan oleh aparat dan caption memuat pernyataan mengenai respon PBB terhadap kekerasan aparat dan penggunaan gas air mata, penangkapan sewenang-wenang, dan intimidasi oleh aparat. Tanda visual siluet aparat berwarna merah muda dengan memegang senjata dan berhadapan dengan sekelompok massa. Tanda audio berupa rekaman juru bicara PBB yang menyampaikan pernyataan terkait pentingnya peliputan saat demonstrasi dan kewajiban aparat untuk mematuhi standar internasional dalam menggunakan kekuatan.
Konotasi	Tanda visual siluet aparat warna merah muda dengan memegang senjata menunjukkan kontradiksi antara simbol kelembutan yang ditandai dengan warna merah muda dan penggunaan senjata yang dimaknai sebagai tindakan kekerasan aparat sehingga keseluruhan tanda mengalami pergeseran makna kelembutan menjadi bentuk penggunaan kekuatan secara berlebihan artinya terdapat penyalahgunaan wewenang yang melanggar prinsip HAM. Tanda verbal berupa kutipan dari juru bicara PBB mengonotasikan legitimasi internasional terhadap isu kekerasan aparat sekaligus menegaskan bahwa permasalahan tersebut telah menjadi perhatian dunia dan harus diselesaikan sesuai dengan norma dan standar internasional. Tanda audio berupa suara dari juru bicara PBB dikaitkan dengan simbol otoritas internasional dalam bidang HAM yang memiliki legitimasi politik dalam kondisi global sehingga postingan tersebut dimaknai sebagai upaya untuk mendesak pemerintah dan aparat dalam menjamin kebebasan berekspresi dan menghentikan tindakan represi aparat terhadap demonstran.

Mitos	Mitos “kebebasan berkumpul dan beropini secara damai merupakan hak fundamental bagi rakyat dalam prinsip HAM internasional” (Suci et al., 2025). Hal tersebut didasarkan atas ideologi liberalisme yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam lingkup demokrasi. Dalam konteks ini, kebebasan berpendapat sebagai hak fundamental bagi individu maupun kelompok dalam sistem demokrasi (Junius Fernando et al., 2022).
-------	--

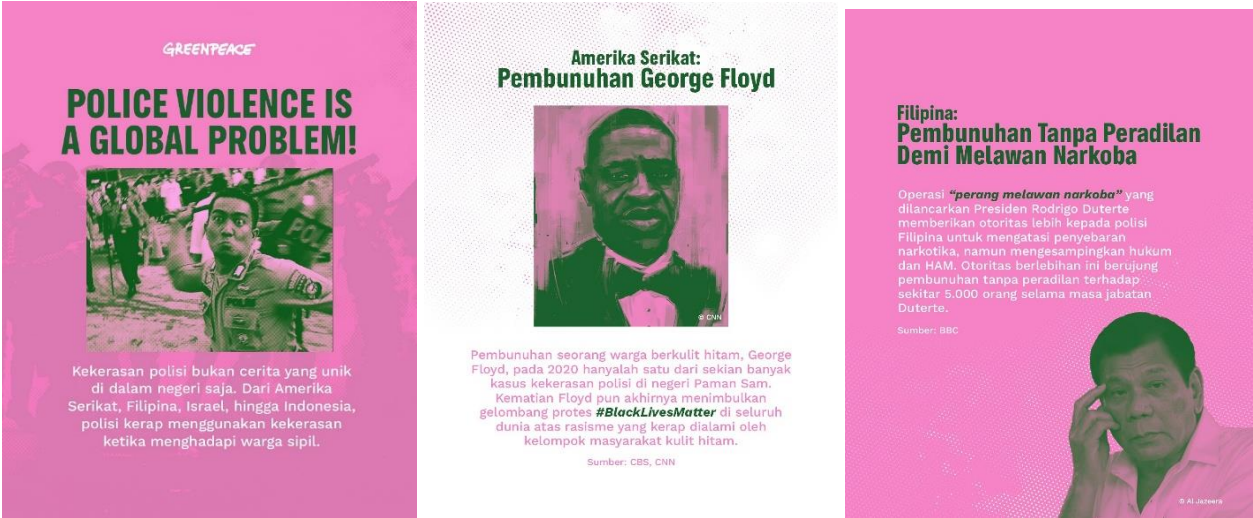


Postingan Keempat (Sumber : Instagram @greenpeace.id tanggal 4 September 2025)

Tabel 4. Hasil Analisis Foto

Tingkatan	Makna
Denotasi	Delapan slide dalam postingan tersebut memuat tanda visual berupa figur seorang jenderal kepolisian menggunakan atribut lengkap dan aparat kepolisian yang membawa senjata saat demonstrasi. Tanda verbal berupa teks “Kenapa rakyat marah pada Polri”, dan ajakan untuk menyimak isi tuntutan rakyat terkait kepolisian, tagar #RESETKEPOLISIAN dalam slide, dan caption membahas tuntutan rakyat 17+8 yang memuat isu penangkapan dan kriminalisasi demonstran, minimnya pemberian sanksi aparat, dan anggaran POLRI dalam APBN 2025 melebihi 100 triliun. Tanda audio berupa lagu Gelap Gempita oleh Sukatani dalam postingan.
Konotasi	Tanda visual jenderal kepolisian yang menggunakan atribut lengkap mengonotasikan simbol otoritas negara yang memiliki legitimasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, visual aparat kepolisian yang membawa senjata saat demonstrasi mengonotasikan penggunaan kekuatan yang represif melalui tindakan kekerasan, penangkapan semena-mena, dan pembubaran paksa aksi unjuk rasa. Tindakan tersebut menunjukkan bentuk pelanggaran peran kepolisian yang seharusnya melindungi dan

	mengayomi masyarakat (Curtice, 2021). Caption tidak hanya sebagai teks pendukung dalam postingan tetapi dapat mengonotasikan kritik terhadap tindakan represi aparat yang dituangkan melalui tuntutan rakyat dengan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat tidak menimbulkan rasa jera dan penggunaan anggaran POLRI lebih diperuntukkan untuk penguatan alat keamanan bukan peningkatan profesionalisme. Tagar #RESETKEPOLISIAN mengonotasikan dorongan masyarakat untuk melakukan reformasi total terhadap institusi kepolisian yang dinilai belum mampu mewujudkan fungsi penegakan hukum secara preventif. Tanda audio berupa lagu Gelap Gempita karya Sukatani tidak hanya sebagai musik pendukung dalam postingan tetapi juga memperkuat citra negatif aparat kepolisian sebagai pihak yang berorientasi pada kekuasaan dengan penggunaan kekuatan berlebihan terhadap masyarakat.
Mitos	Mitos “aparat sebagai penjaga ketertiban” didasarkan atas seragam dan atribut kepolisian yang menaturalisasi anggapan bahwa aparat selalu bertindak untuk menjaga ketertiban. Namun konten tersebut mendekonstruksi mitos dengan menampilkan tindakan represif aparat terhadap demonstran (Iman, 2025). Sehingga simbol seragam kepolisian tidak lagi merepresentasikan perlindungan, melainkan simbol dominasi negara untuk mempertahankan relasi kuasa terhadap masyarakat sipil.



Postingan Kelima (Sumber : Instagram @greenpeace.id tanggal 5 September 2025)

Tabel 6. Hasil Analisis Foto

Tingkatan	Makna
Denotasi	Postingan tersebut berjumlah tujuh slide yang berisi kasus kekerasan polisi di Amerika Serikat, Filipina, Indonesia, dan Israel. Tanda visual aparat kepolisian yang menggunakan

	atribut lengkap saat menghadapi warga sipil, ilustrasi tokoh George Floyd di Amerika Serikat dan Presiden Rodrigo Duterte di Filipina dengan dominasi warna merah muda dan hijau. Tanda verbal mencakup teks “Police Violence Is A Global Problem” dan caption menjelaskan tindakan aparat kepolisian terhadap demonstran dan menyebut penggunaan taktik represif kepada demonstran. Tanda audio berupa penggunaan lagu “Coklat” karya band Pure Saturday.
Konotasi	Tanda visual aparat kepolisian yang memegang senjata lengkap dengan ekspresi wajah tegang dan gestur dalam pengendalian situasi dikaitkan dengan bentuk kewaspadaan sehingga dimaknai sebagai situasi konflik antara aparat dan massa dimana aparat sebagai pihak yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil dengan taktik serupa tentara zionis Israel berbasis <i>state-backed</i> artinya tindakan kekerasan yang didukung oleh pemerintah (Qandeel, 2023). Ilustrasi tokoh George Floyd dan tulisan gerakan Black Lives Matter menyiratkan bahwa kekerasan polisi berkaitan dengan isu rasisme institusional dimana gerakan tersebut bertujuan untuk melakukan perubahan yang positif pada orang kulit hitam mencakup anggota LGBTQ+ (Cross et al., 2022). Dominasi warna merah muda dan hijau dalam postingan dikaitkan dengan adanya pertentangan makna antara keberanian dan harapan sehingga kedua warna tersebut dimaknai sebagai sikap keberanian masyarakat dalam menyampaikan kritik terhadap kepolisian yang diharapkan dapat mendorong transformasi menuju institusi kepolisian yang bersikap adil dan humanis. Visual Rodrigo Duterte mengonotasikan simbol otoritas negara dengan pelimpahan kewenangan yang berlebih kepada polisi sehingga menimbulkan pembunuhan tanpa peradilan. Tanda verbal “Police Violence Is A Global Problem” mengonotasikan kekerasan aparat menjadi bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau permasalahan struktural di berbagai dunia. Caption tersebut memperkuat narasi bahwa tindakan kepolisian yang menangani para demonstran dengan kekuatan fisik secara berlebihan serupa tentara zionis. Lagu “Coklat” dalam penggalan lirik “coklat menari bagai babi” dimana kata “coklat” sebagai simbol institusi kepolisian melalui identitas seragam warna coklat. Pada tingkat konotasi, simbol yang terdapat dalam lagu tersebut merepresentasikan kritik terhadap institusi kepolisian melalui tindakan represif yang menyalahgunakan wewenang sehingga menimbulkan kekecewaan publik.
Mitos	Mitos “kekerasan aparat sebagai bentuk kekuasaan negara” bersumber dari ideologi otoritarianisme yang menggunakan kekuatan sebagai cara untuk merespon perlawanan masyarakat. Mitos ini diperkuat oleh kasus kekerasan polisi sebagai permasalahan global yang didokumentasikan melalui rekaman media sosial yang menunjukkan tindak pelanggaran HAM sehingga menimbulkan aksi unjuk rasa (Magaloni, 2024).

3.1.3 Resistensi Gender dan Inklusivitas

Resistensi gender dan inklusivitas ditandai dengan upaya mengekspresikan ketidakadilan berbasis gender terutama terkait kritik terhadap kebijakan pemerintah yang tidak mendahulukan hak perempuan dengan memberikan ruang kebebasan untuk memastikan setiap perempuan memiliki akses yang setara untuk terlibat dalam gerakan protes. Pada postingan keenam tanggal 5 September 2025 termasuk dalam tema resistensi gender dan inklusivitas yang menampilkan aksi perempuan dengan atribut didominasi oleh warna pink mengonotasikan sifat kelembutan identik dengan karakter feminim menjadi sumber kekuatan melawan kekerasan negara. Mitos perempuan sebagai agen perubahan dalam mengekspresikan kesetaraan gender yang menaturalisasi bahwa keberanian tidak hanya identik dengan maskulinitas, tetapi diwujudkan melalui nilai feminim yang menciptakan ruang yang inklusif tanpa memandang gender.



Postingan Keenam (Sumber : Instagram @greenpeace.id tanggal 5 September 2025)

Tabel 7. Hasil Analisis Foto dan Video

Tingkatan	Makna
Denotasi	Postingan ini terdiri atas delapan slide yang menampilkan aksi damai Aliansi Perempuan Indonesia dan masyarakat sipil di depan Gedung DPR/MPR RI. Tanda visual berupa peserta aksi membawa poster, sapu lidi, pengeras suara, dan bunga matahari. Selain itu, tanda audio mencakup cuplikan rekaman perempuan melakukan cap tangan bersama dengan dominasi atribut berwarna merah muda dan rekaman audio seorang perempuan yang membahas hak perempuan, serta cuplikan video perempuan memegang pengeras suara yang didampingi oleh penerjemah bahasa isyarat dalam panggung orasi. Terdapat tanda verbal berupa teks dalam poster “ <i>Finding Strength in Softness</i> ”, “Protes adalah Hak”, dan “Awat Cari Muka” sebagai pesan utama aksi. Caption memuat narasi mengenai aksi “Perempuan Melawan Kekerasan

	Negara” bersama ratusan elemen masyarakat sipil,
Konotasi	Dominasi warna merah muda dalam postingan dikaitkan dengan identitas perempuan yang bersifat feminin dan lembut namun dalam konteks tersebut warna merah muda mengalami pergeseran makna menjadi bentuk perlawanan damai oleh perempuan. teks “<i>Finding Strength in Softness</i>” dikaitkan dengan gagasan bahwa kelembutan tidak bersifat lemah sehingga dalam teks tersebut bermakna kelembutan sebagai sumber kekuatan dan solidaritas dalam melawan ketidakadilan (Veillette, 2021). Tanda verbal berupa teks “Awasi Cari Muka” tidak hanya sebagai tanda peringatan namun mengandung kritik terhadap pihak yang dianggap mengabaikan kepentingan rakyat, sedangkan “Protes adalah Hak” menegaskan kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam ranah politik. Tanda visual sapu lidi sebagai simbol persatuan yang dimaknai sebagai kekuatan kolektif dalam memperjuangkan tuntutan rakyat dan bunga matahari sebagai simbol harapan dalam mewujudkan perubahan kondisi politik yang lebih baik. Tanda audio berupa perempuan melakukan cap tangan bersama dimaknai sebagai simbol solidaritas dan dukungan terhadap kesetaraan gender, rekaman audio yang membahas hak perempuan menunjukkan upaya dalam menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang tidak mendahulukan hak perempuan, cuplikan video perempuan memegang pengeras suara sebagai simbol keberanian dalam menyuarakan tuntutan keadilan. Sedangkan kehadiran penerjemah bahasa isyarat menunjukkan aksi tersebut bersifat inklusif bagi penyandang disabilitas (Wessling et al., 2025). Caption mengonotasikan solidaritas perempuan yang berperan aktif dalam memperjuangkan keadilan melalui aksi demonstrasi.
Mitos	Mitos yang dibangun melalui dominasi warna merah muda menunjukkan adanya upaya memaknai ulang femininitas dalam ruang politik. Warna merah muda yang selama ini dilekatkan pada sifat kelembutan dan kepasifan dinaturalisasi kembali sebagai simbol keberanian, solidaritas, dan perlawanan terhadap ketidakadilan (Khalid et al., 2026). Dengan demikian, konten tersebut membangun narasi bahwa perempuan bukan hanya objek kebijakan negara saja, melainkan aktor politik yang memiliki legitimasi untuk menyuarakan kritik dan memperjuangkan perubahan sosial.

3.1.4 Resistensi Melalui Artikulasi Tuntutan Rakyat

Resistensi melalui artikulasi tuntutan rakyat sebagai tindakan kolektif masyarakat dalam mengomunikasikan kritik akibat kebijakan pemerintah yang mengesampingkan kepentingan rakyat dan menuntut perubahan kebijakan yang adil dan transparan. Pada postingan ketujuh tanggal 3 September 2025,

kedelapan tanggal 9 September 2025, dan kesembilan tanggal 9 September 2025 sebagai bagian dari tema resistensi melalui artikulasi tuntutan rakyat dalam instagram @greenpeaceid.

Postingan ketujuh dan kedelapan menampilkan tanda verbal dan visual aksi mobilisasi massa dengan atribut lengkap dalam menuntut kebijakan fiskal. Tanda audio berupa lagu “Menjadi Indonesia” terdapat pada postingan ketujuh. Berbeda dengan postingan kesembilan mencakup tanda visual dan verbal berupa ilustrasi gunung es di tengah lautan serta tanda audio berupa lagu “Nirrrlaba”. Postingan ketujuh dan kedelapan mengonotasikan tuntutan reformasi sistem pajak yang didasari atas sikap keberanian rakyat dalam merespon ketimpangan. Makna konotasi pada postingan kesembilan menunjukkan sesuatu yang tampak di permukaan hanya sebagian kecil dari permasalahan kompleks pada bagian bawah. Ketiga postingan tersebut membentuk mitos bahwa tuntutan rakyat sebagai bentuk kontra hegemoni dalam melawan narasi kepatuhan yang biasa ditekankan oleh penguasa.



Postingan Ketujuh (Sumber : Instagram @greenpeace.id tanggal 3 September 2025)

Tabel 3. Hasil Analisis Foto

Tingkatan	Makna
Denotasi	Postingan tersebut terdiri dari delapan slide dengan tanda visual berupa bendera <i>one piece</i> dan bendera merah putih yang digunakan oleh demonstran. Tanda verbal berupa teks “Pajak Mencekik, Rakyat Bergerak”, “17+8 Tuntutan Rakyat, data faktual mengenai presentase kenaikan PBB-P2 di berbagai daerah dan tabel yang menyajikan opsi lain sumber penerimaan negara seperti pajak orang super kaya, produksi batu bara dan sektor ekstraktif. Selain itu,

	caption membahas kenaikan PBB-P2 dan kritik terhadap sikap pejabat negara. Tanda audio berupa lagu “Menjadi Indonesia” karya Efek Rumah Kaca sebagai pesan pendukung dalam postingan tersebut.
Konotasi	Tanda visual para demonstran yang memanjat pagar dan mengibarkan bendera merah putih mengonotasikan perlawanan rakyat terhadap kebijakan pajak negara yang tidak adil dimana penggunaan bendera merah putih dikaitkan dengan simbol nasionalisme yang menunjukkan semangat masyarakat dalam memperjuangkan keadilan. Bendera <i>one piece</i> diasosiasikan dari kisah Luffy dan kru Topi Jerami yang melawan kekuasaan absolut pemerintah dunia sebagai otoritas korup sehingga bendera tersebut dalam aksi demonstrasi dimaknai sebagai simbol keberanian dalam melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak yang menindas. Warna merah muda pada elemen diasosiasikan dengan sifat kelembutan sehingga warna tersebut dimaknai sebagai bentuk solidaritas secara kolektif dalam melawan ketidakadilan. Sedangkan warna hijau pada frasa 17+8 tuntutan rakyat terkait dengan simbol harapan yang dimaknai sebagai bentuk aspirasi agar tuntutan rakyat dapat terpenuhi sehingga diharapkan pemerintah lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Teks “Pajak Mencekik, Rakyat Bergerak”, “17+8 Tuntutan Rakyat” dikaitkan dengan simbol perlawanan akibat tekanan ekonomi yang dihadapi oleh rakyat sehingga menimbulkan aksi kolektif untuk mendorong kebijakan pemerintah yang mengutamakan kepentingan rakyat. Data kenaikan PBB-P2 mengonotasikan legitimasi berbasis fakta terkait kesenjangan kebijakan fiskal yang dinilai membebani rakyat kecil. Lagu “Menjadi Indonesia” oleh efek rumah kaca diasosiasikan dari keprihatinan band terhadap krisis moral dan sosial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sehingga lagu tersebut dimaknai sebagai ajakan untuk bangkit dari keterpurukan menjadi bangsa yang menjunjung tinggi toleransi, ramah tamah, dan peduli. Caption menegaskan tindakan masyarakat dengan melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang tidak adil.
Mitos	Mitos dalam postingan ini memperlihatkan ideologi nasionalisme dimana terdapat dua bendera yang digunakan secara berdampingan yaitu bendera merah putih dan <i>one piece</i> yang dimaknai sebagai simbol perjuangan kolektif dalam menghadapi ketidakadilan serta menegosiasikan ulang makna cinta tanah air. Selain itu, negara berpihak pada kelompok elite melalui penggunaan kekuasaan untuk memperkuat kendali dan dominasi serta membebani rakyat melalui kebijakan pajak yang tidak adil (Closs-Davies et al., 2024).

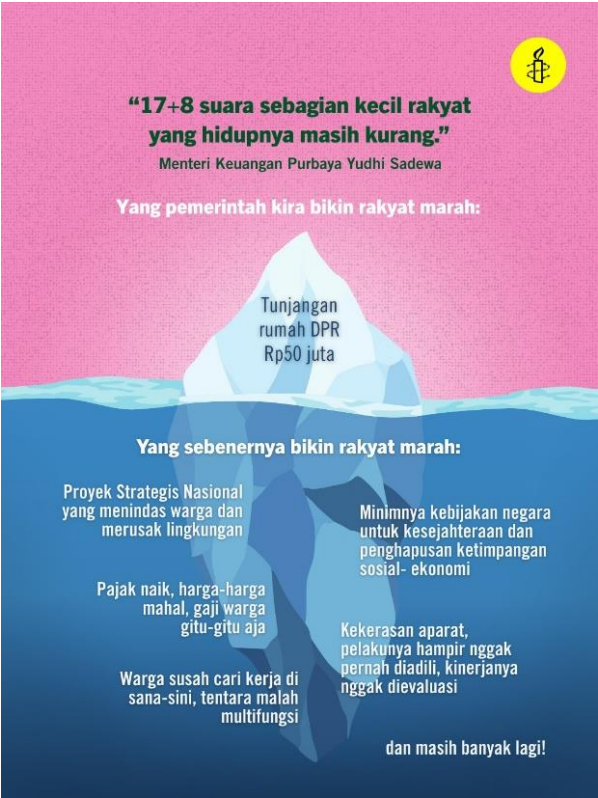


Postingan Kedelapan (Sumber : Instagram @greenpeace.id tanggal 9 September 2025)

Tabel 8. Hasil Analisis Foto

Tingkatan	Makna
Denotasi	Sepuluh slide dalam postingan tersebut berisi tanda visual berupa sekelompok massa yang melakukan demonstrasi di jalan dengan membawa poster, spanduk, dan pengeras suara serta terdapat patung tikus berdasi yang digantung. Tanda verbal berupa teks “Rakyat Merana, Elit Berpesta”, “Time To Resist” serta caption yang berisi narasi tentang gelombang demonstrasi di berbagai daerah, kritik terhadap pemerintah, dan usulan penerapan pajak bagi orang super kaya dan industri ekstraktif.
Konotasi	Tanda visual berupa aksi demonstrasi oleh sekelompok massa dengan atribut yang lengkap diasosiasikan dengan wujud partisipasi dalam bidang politik sehingga tanda tersebut dimaknai sebagai simbol resistensi rakyat untuk menyuarakan tuntutan terhadap kebijakan yang tidak adil (Fauto, 2025). Patung tikus berdasi digantung dikaitkan dengan simbol korupsi yang mengonotasikan bentuk eksploitasi kekuasaan oleh kelompok elite melalui praktik penyalahgunaan kekuasaan. Tanda verbal “Time to Resist” dikaitkan dengan seruan perlawanan yang menunjukkan urgensi untuk melakukan perlawanan secara kolektif terhadap berbagai ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik. Teks “Rakyat Merana, Elit Berpesta” dikaitkan dengan opisisi kelas sosial yang bermakna ketimpangan pajak antara rakyat kecil yang wajib menanggung beban pajak sementara kelompok elite melanggeng bebas tanpa beban pajak. Caption mengonotasikan bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah yang berpihak pada kelompok elite sehingga muncul ketidakpuasan masyarakat yang diwujudkan dalam aksi demonstrasi.
Mitos	Mitos yang dibangun bahwa rakyat diposisikan sebagai korban utama dari kebijakan negara

	yang dianggap berpihak kepada elite. Relasi antara rakyat dan elit dikonstruksi sebagai pertentangan yang bersifat alamiah, sehingga ketimpangan sosial dipahami sebagai konsekuensi dari dominasi kekuasaan. Melalui proses naturalisasi tersebut, perlawanan kolektif terhadap elite ditampilkan sebagai tindakan yang benar untuk mengembalikan keadilan sosial (Aryanti, 2025).
--	---



Postingan kesembilan (Sumber : Instagram @greenpeace.id tanggal 9 September 2025)

Tabel 9. Hasil Analisis Foto

Tingkatan	Makna
Denotasi	Postingan tunggal tersebut menampilkan tanda visual berupa ilustrasi gunung es di tengah lautan dengan elemen bagian atas berwarna merah muda dan elemen bagian bawah berwarna biru. Tanda verbal berupa bagian atas gunung es terdapat pernyataan dari Menteri Keuangan mengenai “17+8 suara sebagian kecil rakyat yang hidupnya masih kurang”. Sedangkan bagian bawah gunung es terdapat permasalahan kompleks seperti kekerasan aparat, kenaikan pajak, lapangan pekerjaan yang sulit, dan lain-lain. Caption memuat pernyataan 17+8 Tuntutan Rakyat tidak mewakili seluruh suara masyarakat menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Tanda audio berupa lagu nirrrlaba karya lomba sihir.
Konotasi	Tanda visual gunung es dikaitkan dengan gagasan bahwa sesuatu yang tampak di permukaan hanya sebagian kecil dari keseluruhan permasalahan sehingga postingan tersebut

	mengonotasikan bahwa terdapat permasalahan tersembunyi yang dirasakan oleh rakyat secara kompleks dibandingkan bagian atas yang hanya terdapat satu permasalahan. Pada bagian atas gunung es mengindikasikan narasi pemerintah yang menganggap kritik publik sebagai suara minoritas. Bagian bawah gunung es menunjukkan permasalahan kompleks yang memicu kemarahan rakyat. Hal tersebut menimbulkan kesenjangan antara pemerintah dan rakyat, artinya pemerintah hanya melihat permukaan masalah sedangkan rakyat mengalami dampak yang lebih luas (Pedroza & Arrighi, 2025). Penggunaan warna pink mengalami pergeseran makna yang awalnya memiliki arti lembut (Aziz et al., 2026), namun dalam konteks tersebut menjadi simbol keberanian dalam melakukan kritik melalui bentuk perlawanan dan warna biru mengonotasikan kedalaman permasalahan yang tidak tampak secara langsung. Penggunaan lagu nirrrlaba secara keseluruhan merepresentasikan kecemasan dan kritikan rakyat terhadap kekuasaan pemerintah dimana penggunaan frasa “salah kami lagi” dikaitkan dengan fenomena <i>victim blaming</i> sebagai tindakan menyalahkan korban dengan menempatkan mereka sebagai pihak yang wajib dimintai pertanggungjawaban atas permasalahan yang terjadi, sehingga mengonotasikan terdapat beban kesalahan yang terus menerus ditujukan kepada rakyat atas permasalahan kompleks. Sedangkan, pengulangan frasa “aku tak peduli” mengindikasikan adanya kelelahan emosional dan sikap apatis akibat tuduhan yang dilakukan secara berulang.
Mitos	Mitos yang dibangun melalui simbol gunung es menunjukkan bahwa persoalan yang tampak di ruang publik hanyalah sebagian kecil dari ketidakadilan struktural yang dialami masyarakat. Visual tersebut menaturalisasi gagasan bahwa negara cenderung mengabaikan persoalan mendasar yang dihadapi rakyat, sehingga kritik publik dipandang sebagai respon yang wajar terhadap ketimpangan sistemik (Khalid et al., 2026). Jadi, resistensi dikonstruksi sebagai bentuk kesadaran kolektif untuk mengungkap realitas yang selama ini tersembunyi di balik narasi pemerintah.

3.2 Pembahasan

Hasil analisis semiotika menunjukkan tanda visual, verbal, dan audio dalam kampanye digital *Brave Pink Hero Green* pada akun instagram @greenpeaceid tidak hanya merepresentasikan resistensi terhadap kebijakan negara akan tetapi juga memberikan narasi tandingan terhadap wacana dominan yang diproduksi oleh negara. Melalui simbol digital, makna yang diproduksi dalam media berkaitan dengan ideologi dan konteks sosial yang tidak sepenuhnya bersifat netral karena terdapat pertarungan makna (Hall, 1997; Rosalini et al., 2025). Greenpeaceid menggunakan resistensi terbuka melalui tuntutan rakyat 17+8 memuat ajakan untuk memobilisasi massa yang disampaikan secara langsung dan terbuka kepada

pemerintah sebagai bentuk penolakan yang terorganisir (Scott, 1985). Selain itu, resistensi yang dilakukan Greenpeaceid juga termasuk resistensi konstruktif karena berupa kritik implisit atau eksplisit terhadap struktur kekuasaan yang mempertahankan status quo. Terdapat unsur konstruktif berupa simbolis yaitu tanda visual yang bertujuan untuk menginspirasi orang lain hingga menyebabkan perubahan cara berperilaku dan berpikir yang dominan (Sørensen, 2016).

Terdapat empat tema yang diidentifikasi dalam postingan kampanye digital *Brave Pink Hero Green* pada akun instagram @greenpeaceid berupa resistensi melalui produksi narasi ketidakadilan, resistensi terhadap represi aparat, resistensi gender dan inklusivitas, serta resistensi melalui artikulasi tuntutan rakyat. Keempat tema tersebut membangun narasi bahwa negara mengalami krisis legitimasi sehingga Greenpeace menggunakan media sosial untuk membangun kesadaran kolektif melalui simbol digital sekaligus menunjukkan bahwa resistensi muncul sebagai bentuk kritik masyarakat terhadap praktik kekuasaan pemerintah yang menyimpang. Temuan tersebut sejalan dengan perspektif Gramsci yang menyatakan bahwa ketika terdapat kekuasaan, maka akan muncul resistensi (Siswati, 2017).

Pertama, resistensi melalui produksi narasi ketidakadilan mencerminkan respon kritis masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang tidak mengutamakan kepentingan publik terutama terkait kebijakan fiskal yang tidak adil dan kemarahan rakyat terhadap pemerintah atas permasalahan kompleks mulai dari kinerja DPR yang dinilai gagal dan tindakan aparat represif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *authoritarian statism*, dimana negara mengontrol berbagai aspek sosial dan ekonomi, namun melemahkan peran lembaga demokrasi dan membatasi kebebasan masyarakat (Wijaya & Jayasuriya, 2026). Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Wahjono et al. (2025) yang menyatakan bahwa kritik terhadap kebijakan fiskal direpresentasikan melalui tanda visual dalam postingan Instagram sebagai bentuk ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah. Mitos beroperasi melalui proses naturalisasi yang membuat ideologi dan nilai yang ditampilkan seolah-olah sebagai hal yang alamiah (Barthes, 2012). Mitos yang terbentuk berakar dari populisme sebagai ideologi yang menekankan kondisi berlawanan dimana rakyat sebagai pihak yang dirugikan terhadap kebijakan yang menguntungkan kaum elite. Melalui tema postingan tersebut, kritik terhadap kebijakan fiskal, tindakan represi aparat, dan kinerja DPR mencerminkan resistensi masyarakat sipil terhadap praktik kekuasaan yang dilakukan oleh masyarakat politik. Temuan tersebut sejalan dengan buku Mouffe (2014) yang menyatakan bahwa masyarakat politik sebagai kelompok yang memiliki kekuatan dalam mempertahankan dominasi melalui peran lembaga negara, sedangkan masyarakat sipil sebagai arena kelompok subordinat untuk membangun konsensus.

Kedua, resistensi terhadap represi aparat menunjukkan bentuk kritik masyarakat terhadap institusi kepolisian yang melanggar prinsip HAM. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Etim et al. (2025) yang menyatakan bahwa Instagram sebagai platform yang memuat gambar dan video terkait aksi kebrutalan polisi. Aksi tersebut menunjukkan upaya kelompok subordinat untuk menentang ideologi dan

nilai dominan yang dinaturalisasi melalui pihak berkuasa. Hal tersebut sejalan dengan persepektif Gramsci yang menyatakan bahwa kelompok subordinasi dapat melakukan kontra hegemoni dengan menolak narasi dominan yang melegitimasi praktik penindasan (Suhardi, 2024). Atribut yang dikenakan polisi membentuk mitos bahwa aparat sebagai simbol otoritas yang memiliki wewenang dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun atribut kepolisian tersebut mengalami pergeseran makna menjadi simbol tindakan represif dengan penyalahgunaan wewenang dalam menghadapi para demonstran. Barthes menekankan bahwa fashion sebagai tanda (*sign*) yang tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, namun dapat menciptakan mitos yang menaturalisasi nilai budaya tertentu sehingga tampak alamiah (Barthes, 1990).

Ketiga, resistensi gender dan inklusivitas memperlihatkan dominasi warna merah muda dalam poster dan atribut perempuan mewakili simbol feminim yang menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi kekerasan negara. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Aziz et al. (2026) yang menyatakan bahwa warna sebagai tanda visual yang memiliki makna secara emosional sebagaimana warna *Brave Pink* merepresentasikan keberanian yang muncul dari sifat feminim seperti kelembutan dan empati. Pada tataran mitos, makna tersebut muncul karena konstruksi budaya yang mengaitkan warna merah muda identik dengan karakter feminim. Dengan demikian, terbentuk mitos bahwa keberanian tidak selalu identik dengan sifat maskulin artinya mitos ini bekerja melalui proses naturalisasi bahwa perempuan sebagai subjek aktif dalam mengekspresikan penolakan terhadap kebijakan publik yang tidak mendahulukan hak perempuan. Tema tersebut menunjukkan bahwa media sosial Instagram sebagai ruang kontra hegemoni terhadap wacana patriarki yang dominan dengan menegaskan bahwa perempuan tidak hanya berperan dalam ranah domestik melainkan juga dapat menjadi subjek aktif yang berperan dalam melakukan gerakan sosial (Indranila, 2022).

Keempat, resistensi melalui artikulasi tuntutan rakyat menunjukkan kekecewaan rakyat akibat permasalahan kompleks sehingga memicu tindakan kolektif berupa aksi demonstrasi. Media sosial sebagai arena perlawanan simbolis melalui tanda visual untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah melalui aksi protes (Maskuri, 2025). Dalam konteks ini, perlawanan tidak hanya melalui aksi fisik di jalanan, tetapi juga melalui media digital. Dengan demikian, terbentuk mitos bahwa aksi demonstrasi sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam ranah politik untuk menentang kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan publik. Resistensi melalui artikulasi tuntutan rakyat sebagai upaya masyarakat sipil untuk menentang kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat artinya kebijakan tertentu hanya menguntungkan pejabat elite. Gramsci menyatakan bahwa tindakan tersebut sebagai kontra hegemoni yaitu upaya untuk menentang hegemoni yang pada satu sisi merugikan pihak tertentu namun di sisi lain menguntungkan pihak lain (Anggraini et al., 2023).

Instagram sebagai platform media sosial dimana akun @greenpeaceid sebagai bagian dari

organisasi non-profit yang tidak hanya menyebarkan informasi terkait resistensi, tetapi juga membentuk komunitas digital yang mendorong tindakan masyarakat untuk melakukan perubahan sosial (Lovejoy & Saxton, 2012). Sebagai media komunikasi berbasis visual, Instagram tidak hanya berperan sebagai alat penyebaran informasi tetapi juga menjadi media representasi yang memproduksi makna melalui teks, gambar, dan audio. Oleh karena itu, kampanye digital *Brave Pink Hero Green* tidak hanya sebagai media komunikasi visual, tetapi juga sebagai teks semiotik (Salsabila et al., 2026). Dalam aktivisme digital, media sosial instagram memungkinkan mobilisasi massa berlangsung secara cepat dan melampaui batasan ruang dan waktu melalui proses sirkulasi simbol (Ferry & Waluyo, 2026). Begitu pula kampanye digital *Brave Pink Hero Green* yang dilakukan oleh Greenpeaceid di Instagram dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam gerakan sosial. Namun, instagram juga terkait dengan algoritma platform yang dapat membatasi sudut pandang lain dan penyebaran simbol (N. Putri, 2023).

Melalui proses naturalisasi makna, media sosial Instagram berperan sebagai arena produksi kontra hegemoni (Indranila, 2022). Dalam instagram, terdapat upaya yang dilakukan oleh kelompok subordinat untuk melawan dominasi kekuasaan melalui proses sirkulasi simbol sehingga berpotensi menciptakan gerakan sosial yang lebih luas (Suhardi, 2024). Greenpeaceid melakukan kontrahegemoni dengan memperlihatkan kontradiksi antara narasi yang ingin mereka tampilkan dan narasi dominan. Seperti salah satunya pada tema resistensi melalui represi aparat dimana narasi dominan adalah aparat bertugas menjaga keamanan sedangkan narasi Greenpeace menunjukkan bahwa aparat melakukan represi. Dengan demikian, akun instagram @greenpeaceid sebagai media yang turut mendukung dalam penyebaran wacana kontra hegemoni melalui unggahan konten digital berupa simbol yang menentang narasi dominan oleh kelompok elite.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis semiotika Roland Barthes terhadap tanda visual, verbal, dan audio pada sembilan postingan dalam kampanye digital *Brave Pink Hero Green*, penelitian ini menemukan empat tema resistensi pada akun Instagram @greenpeaceid yang menunjukkan adanya praktik kontra hegemoni. Empat tema tersebut yaitu resistensi melalui produksi narasi ketidakadilan, resistensi terhadap represi aparat, resistensi gender dan inklusivitas, serta resistensi melalui artikulasi tuntutan rakyat. Dalam perspektif Gramsci, kontra hegemoni terjadi ketika masyarakat sipil sebagai kelompok subordinat memanfaatkan media sosial untuk menentang dominasi kekuasaan yang dilakukan oleh aparat dan lembaga negara melalui produksi narasi tandingan terkait isu sosial dan politik. Dengan demikian, akun instagram @greenpeaceid sebagai arena pertarungan makna yang mengartikulasikan resistensi terhadap praktik kekuasaan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Penelitian ini hanya berfokus pada satu objek yaitu postingan kampanye digital *Brave Pink Hero Green* yang menganalisis tanda visual, verbal, dan audio dalam setiap tema resistensi berdasarkan akun

instagram @greenpeaceid melalui teori semiotika Roland Barthes dan kontra hegemoni Antonio Gramsci. Oleh karena itu, hasil penelitian bersifat kontekstual dan terbatas pada makna resistensi yang dikonstruksikan dalam kampanye digital tersebut. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian melalui media sosial selain Instagram dengan teori yang berbeda sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Greenpeaceid dalam mengembangkan strategi komunikasi yang tepat dalam kampanye digital sehingga dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat.

PERSANTUNAN

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Ucapan terima kasih peneliti tujukan kepada kedua orang tua yang senantiasa mendoakan dengan tulus dan memberikan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini, Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yudha Wirawanda, S.I.Kom., M.A selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran dengan penuh kesabaran. Selain itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen Ilmu Komunikasi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan juga teman-teman yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, I. M., & Cangara, H. (2022). Kritik sosial kebijakan pemerintah dalam platform media sosial dengan pendekatan komunikasi hyperpersonal. *Jurnal Nomosleca*, 8(1), 91–100.
- Alruwaili, H. M., Hashem, M. E., Azhuri, K. B. O., & Khafaga, A. (2025). Contextual Significations of al-birr and al-qist in the Qur'an: A Semiotic Approach. *World Journal of English Language*, 15(7), 203–219. <https://doi.org/10.5430/wjel.v15n7p203>
- Amali, A. R., & Priatna, W. B. (2024). Peran kampanye digital di Instagram@ rekamnusantara dalam meningkatkan partisipasi publik. *Journal Media Public Relations*, 5(1), 205–213.
- Amsalis, Y. (2022). *Antonio Gramsci Sang Neo Marxis*. Basabasi.
- Anggraini, M., Utari, P., & Satyawan, I. A. (2023). Counter Hegemony Online Media Reporting on Marginalized Religious Groups: A Case Study of the Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman (Sejuk). *JURNAL KOMUNIKASI INDONESIA*, 12(1), 1–15.
- Arianita, V. B. J., Roosinda, F. W., & Ekantoro, J. (2021). Kampanye digital pada Instagram@ Perhumas_Indonesia melalui# IndonesiaBicaraBaik dalam mewujudkan masyarakat 5.0. *INTELEKTUAL (Jurnal Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi)*, 8(2), 113–122.
- Aripai, R., & Hayat, N. (2024). ANALISIS SEMIOTIKA TERHADAP PENGGUNAAN MEME TIKUS BERKEPALA PUAN MAHARANI. *CORE: Journal of Communication Research*, 1–7.
- Aryanti, M. P. (2025). SIMBOLISME BRAVE PINK DAN HERO GREEN DALAM GERAKAN POLITIK MASYARAKAT INDONESIA. *Journal Media Public Relations*, 5(2), 661308.
- Ayuningtyas, W. E. P., Novianti, S., Setiawan, A., Arbiyanti, H., & Putri, B. O. (2026). From Pop Culture to Political Symbols: Brave Pink, Hero Green, and Resistance Blue in Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(1), 770–789.

- Aziz, A., Ardiandhini, A. D., Puspitasari, I., & Hutapea, E. B. T. (2026). Analisis Semiotika Charles Morris terhadap Pemaknaan Warna Brave Pink dan Hero Green pada Foto Profil Media Sosial dalam Prahara Agustus 2025. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(2), 1258–1271.
- Baharuddin, B., Zulkarnain, I., Mailin, M., & Adam, S. M. (2025). Social Criticism In Communication: A Critical Theory Perspective. *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*, 7(2), 650–665.
- Barthes, R. (1990). *The fashion system*. Univ of California Press.
- Barthes, R. (2012). *Elemen-elemen semiologi*. Basabasi.
- Busumtwi-Sam, J., & Kashyap, R. (2025). Racialised Representations and the Global South: Insights from Critical Race Studies. *India Quarterly*, 81(2), 158–180. <https://doi.org/10.1177/09749284251328227>
- Calabuig, V., & Olcina, G. (2023). The elite, inequality and the emergence of progressive taxation. *European Journal of Political Economy*, 79, 102433. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2023.102433>
- Closs-Davies, S. C., Bartels, K. P. R., & Merkl-Davies, D. M. (2024). How tax administration influences social justice: The relational power of accounting technologies. *Critical Perspectives on Accounting*, 100, 102758. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2024.102758>
- Cornet, V. P., Hall, N. K., Cafaro, F., & Brady, E. L. (2017). How image-based social media websites support social movements. *Proceedings of the 2017 CHI Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems*, 2473–2479.
- Cox, R. H., & Schilthuis, A. (2012). Hegemony and counterhegemony. *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Globalization*.
- Cross, William E, Neville, Helen A, Austin, Crystal L, & Reinhardt, Jessica S. (2022). Black Lives Matter and Nigrescence Theory: When Police Violence Triggers an Encounter. *Journal of Black Psychology*, 48(3–4), 309–326. <https://doi.org/10.1177/00957984221086449>
- Curtice, Travis. (2021). How Repression Affects Public Perceptions of Police: Evidence from a Natural Experiment in Uganda. *Journal of Conflict Resolution*, 65(10), 1680–1708. <https://doi.org/10.1177/00220027211013097>
- Darwis, Y., & Azwar, A. (2024). *Teori Kritis Dalam Studi Komunikasi*. Kencana.
- Deha, D. (2021). Representasi ideologi populisme dalam pemberitaan tempo co. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 150–165.
- Elizabeth, J. D., & Mustikasari, R. P. (2024). Analisis Penyampaian Pesan dalam Konten Akun Instagram@ Greenpeace. id pada Periode 28 November 2023–10 Februari 2024. *JiIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(9), 9733–9741.
- Etim, E., Fatile, J. O., Duke, J. E., Ibikunle, B. Q., & Duru, E. J. C. (2025). Digital activism and collective resistance to police brutality: Systematic review of the quieter and less visible narratives of #EndSARS protest. *Social Sciences & Humanities Open*, 12, 101722. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101722>
- Fadli, A., & Sazali, H. (2023). Peran media sosial Instagram@ greenpeaceid sebagai media kampanye dalam menjaga lingkungan. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi*, 8(2), 209–222.
- Farid, M. (2024). Pemetaan Aktivisme Digital Studi Netnografi Kampanye# FreePalestine di Media Sosial. *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(2), 287–305.
- Fauto, N. S. (2025). Analisis Framing Media Digital Terhadap Pemberitaan Demonstrasi di Indonesia.

Medium, 13(2), 187–204.

- Ferry, I., & Waluyo, G. (2026). Transformasi Gerakan Sosial di Era Digital: Studi Kasus Aksi Online dan Mobilisasi Massa. *Journal of Social and Political Inquiry*, 1(1), 27–33.
- Filc, D. (2021). Is resistance always counter-hegemonic? *Journal of Political Ideologies*, 26(1), 23–38.
- Frantz, T. R. (1987). The role of NGOs in the strengthening of civil society. *World Development*, 15, 121–127. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0305-750X\(87\)90150-1](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0305-750X(87)90150-1)
- Gramsci, A., Hoare, Q., & Nowell-Smith, G. (1971). *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*. International Publishers. <https://books.google.co.id/books?id=z4vFJ-3jh6sC>
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural Representations And Signifying Practices*. SAGE Publications.
- Haryono, C. G. (2020). *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (D. E. Restiani, Ed.). CV Jejak, anggota IKAPI.
- Huang, J. (2025). Why the glass church crumbled: a semiotic reading of Oscar and Lucinda. *Language and Semiotic Studies*, 11(3), 401–421. <https://doi.org/10.1515/lass-2025-0066>
- Iman, M. F. S. (2025). Citizens' resistance against repressive state apparatuses through music: a critical discourse analysis. *Jurnal Studi Komunikasi*, 9(3), 761–770.
- Indranila, A. (2022). Social Media as a Counter Space for the Motherhood Community in Creating Counter-Hegemony. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 11(2), 4.
- Joyce, M. C. (2010). *Digital activism decoded: The new mechanics of change*. Idea.
- Junius Fernando, Z., Pujiyono, Rozah, U., & Rochaeti, N. (2022). The freedom of expression in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2103944. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2103944>
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68.
- Khalid, F., Mahesa, D. C., Mufidah, G., & Yunus, Y. (2026). DEMOKRASI BERWARNA: SEMIOTIKA WARNA, IDEOLOGI, DAN POLITIK REPRESENTASI DALAM POSTER 17+ 8 TUNTUTAN RAKYAT INDONESIA. *Literasi: Jurnal Bahasa Dan Sastra Indonesia Serta Pembelajarannya*, 10(1), 71–93.
- Lovejoy, K., & Saxton, G. D. (2012). Information, community, and action: How nonprofit organizations use social media. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 17(3), 337–353.
- Magaloni, B. (2024). Challenges in creating humane and equitable policing: A focus on the Global South. *Criminology & Public Policy*, 23(1), 3–25.
- Maskuri, M. I. N. (2025). Visual Meaning in Digital Protests: The Use of Brave Pink and Hero Green in Social Media after the August 28–30, 2025 Demonstration. *SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi*, 19(2), 157–172.
- Mouffe, C. (2014). *Gramsci and Marxist Theory (RLE: Gramsci)*. Routledge.
- Mozumder, N. A. (2022). Can ethical political leadership restore public trust in political leaders? *Public Organization Review*, 22(3), 821–835.
- Mundt, M., Ross, K., & Burnett, C. M. (2018). Scaling Social Movements Through Social Media: The Case of Black Lives Matter. *Social Media and Society*, 4(4). <https://doi.org/10.1177/2056305118807911>

- Nawar, M. F. (2024). Analisis Kualitatif terhadap Fenomena "Peringatan Darurat Garuda Biru": Memahami Peran Framing dan Resonansi Emosional dalam Membentuk Opini Publik. *KOMUNIKATIF: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 13(2), 235–250.
- Pedroza, L., & Arrighi, J.-T. (2025). Perspectives on the implementation gap in citizenship policy. *Comparative Migration Studies*, 13(1), 6. <https://doi.org/10.1186/s40878-025-00424-4>
- Prasetya, A. B. (2019). *Analisis Semiotika Film dan Komunikasi*. Intrans Publishing.
- Putri, N. (2023). Media Sosial dan Isolasi Digital: (Kajian Teori Information Gaps pada Algoritma Filter Bubble). *Sadida Islamic Communications and Media Studies*, 3(1), 17–32.
- Putri, S. A. (2025). Representasi Isu Lingkungan dalam Konten Instagram Greenpeace Indonesia. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 8(2), 370–381.
- Qandeel, M. (2023). Violence and State Attribution: The Case of Occupied Palestine. *Journal of Palestine Studies*, 52(2), 43–63. <https://doi.org/10.1080/0377919X.2023.2218588>
- Rosalini, R. H., Nugraha, F. A., & Syukron, D. (2025). “Pink Brave” dan “Hero Green” sebagai narasi simbolik pergerakan publik. Analisis kritis dalam perspektif Roland Barthes. *AL-MANAR: Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam*, 14(2), 486–500.
- Salsabila, S., Permaludin, U., & Sakinah, R. M. N. (2026). Signs of Verbal Resistance in the Brave Pink and Hero Green Campaign Posters. *Journal of English Language and Education*, 11(1), 507–518.
- Scott, J. C. (1985). *Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance*. Yale University Press.
- Setianti, Y., Dida, S., Damayanti, T., & Priyatna, C. C. (2025). Public perception of health information, treatment beliefs, and disease in Indonesia: Effective health promotion strategies. *Social Sciences and Humanities Open*, 11, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101639>
- Siswati, E. (2017). Anatomi teori hegemoni Antonio Gramsci. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 5(1), 11–33.
- Sørensen, M. J. (2016). Constructive resistance: Conceptualising and mapping the terrain. *Journal of Resistance Studies*, 2(1), 49–78.
- Suci, N. P., Basanda, N. R., & Zahiyatunnisa, Z. (2025). Kekerasan Negara Terhadap Rakyat: Tinjauan HAM dalam Penanganan Aksi Demonstrasi. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 4(1), 12–24.
- Suhardi, S. (2024). Bentuk-bentuk counter-hegemoni media era internet. *Journal Media Public Relations*, 4(2), 23–30.
- Suharto, S., Supriyadi, R. P., Rusadi, U., Syafrul, S., & Ramadhan, S. (2026). Dinamika Ekonomi Politik Media Digital: Analisis Berbasis Teori Kritis tentang Kasus Kontemporer di Indonesia. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 168–180.
- Sviličić, N., Radek, I., & Grabar, I. (2024). Color Semiotics: Color as a Medium of Communicating Culture and Emotions. *Collegium Antropologicum*, 48(1), 1–7.
- Toni, A. (2025). A Semiotic Analysis of Marketing Communication in Advertising Film: The Case of Riri Riza's Work for OPPO Indonesia. *Studies in Media and Communication*, 13(2), 306–321. <https://doi.org/10.11114/smc.v13i2.7507>
- Urrahmah, S., Nurhayati, N., Denilza, I. A., & Suhemi, M. (2026). Analisis Semiotika Roland Barthes pada Representasi Konflik Batin Akaza dalam Anime Demon Slayer: Infinity Castle. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 711–723.
- Vinthagen, S., & Lilja, M. (2007). Resistance. *Encyclopedia of Activism and Social Justice*, 1, 1216–

1217.

- Wahjono, D. S., Hilvania, I., & Burhanuddin, R. A. (2025). Representasi Resistensi Netizen Melalui Karya Visual Meme Pajak di Instagram (Analisis Semiotika Roland Barthes). *Jurnal Public Relations (J-PR)*, 6(2), 24–31.
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63–83.
- Wijaya, T., & Jayasuriya, K. (2026). Contextualising the 2025 Indonesian Protests: Authoritarian Statism, Militarisation, and the Crisis of Social Reproduction. *Journal of Contemporary Asia*, 56(1), 149–160. <https://doi.org/10.1080/00472336.2025.2564143>

